

Menari Bersama Hegel di Era Post-Truth: Dialektika, Moralitas, dan Pengembangan Karakter

Julius Stefanus Sibagariang

Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Indonesia
juliusstefanus4@gmail.com

ABSTRACT

The post-truth era is characterized by the weakening of the authority of truth, the dominance of emotion over rationality, and the fragmentation of the public sphere, which has led to a moral crisis and the fragility of human character. This study aims to explore the relevance of Hegel's philosophy as a conceptual framework for responding to this crisis. Using a qualitative method based on literature studies and Hegel's dialectical analysis, this study reinterprets the concepts of 'Geist', 'Bildung', and 'Sittlichkeit' as strategies for character development. The results of the study show that true character can only be formed through intersubjective consciousness, historical-cultural processes, and ethical praxis in the community. Therefore, character education in the post-truth era should not stop at digital literacy or the internalization of moral values, but must foster critical reflection, moral courage, and active participation in ethical life together. This study concludes that the post-truth crisis is not only a threat, but also a dialectical opportunity to strengthen human integrity and rebuild the moral foundations of contemporary society.

Keywords: Post-truth, moral crisis, character development, Hegelian dialectic

ABSTRAK

Era post-truth ditandai oleh melemahnya otoritas kebenaran, dominasi emosi atas rasionalitas, serta fragmentasi ruang publik yang berdampak pada krisis moral dan rapuhnya karakter manusia. Penelitian ini bertujuan menggali relevansi filsafat Hegel sebagai kerangka konseptual untuk merespons krisis tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis dialektika Hegel, penelitian ini menafsirkan kembali konsep Geist, Bildung, dan Sittlichkeit sebagai strategi pengembangan karakter. Hasil kajian menunjukkan bahwa karakter sejati hanya dapat terbentuk melalui kesadaran intersubjektif, proses historis-kultural, dan praksis etis dalam komunitas. Oleh karena itu, pendidikan karakter di era post-truth tidak cukup berhenti pada literasi digital atau internalisasi nilai moral, tetapi harus menumbuhkan refleksi kritis, keberanian moral, serta partisipasi aktif dalam kehidupan etis bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis post-truth bukan hanya ancaman, melainkan peluang dialektis untuk memperkuat integritas manusia dan membangun kembali fondasi moral masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Post-truth, krisis moral, pengembangan karakter, dialektika Hegelian

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berelasi dengan dunia dan dengan sesamanya. Media sosial, algoritma digital, serta platform berita daring menghadirkan arus informasi yang masif, cepat, dan nyaris tanpa jeda. Di satu sisi, kondisi ini membuka ruang demokratisasi pengetahuan; namun di sisi lain, ia juga melahirkan fenomena yang semakin sering disebut sebagai era *post-truth*. Istilah ini merujuk pada situasi sosial di mana fakta objektif kehilangan daya normatifnya dalam membentuk opini publik, sementara emosi, keyakinan personal, dan kepentingan politis menjadi penentu utama penerimaan suatu klaim sebagai “benar” (Effron & Helgason, 2022).

Namun, pemahaman *post-truth* sebagai sekadar persoalan banjir informasi atau manipulasi media berisiko menyederhanakan problem yang jauh lebih mendasar. Untuk memahami krisis ini secara memadai, perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *truth* dalam istilah *post-truth*. Dalam diskursus filsafat, kebenaran memiliki beragam konsepsi, mulai dari kebenaran korespondensi (kesesuaian antara pernyataan dan fakta objektif), kebenaran koherensi (konsistensi internal dalam suatu sistem kepercayaan), hingga kebenaran

pragmatis dan konsensus. Dalam konteks *post-truth*, yang terutama dilampaui (*post*) bukanlah seluruh konsep kebenaran tersebut secara serentak, melainkan kebenaran dalam arti korespondensi faktual, yakni relasi antara klaim dan realitas objektif yang dapat diuji secara publik. Era *post-truth* ditandai oleh pengabaian atau relativisasi dimensi ini, bukan karena fakta lenyap, melainkan karena fakta tidak lagi dianggap normatif bagi penilaian sosial dan politik.

Dengan demikian, *post-truth* bukan pertama-tama menunjuk pada hilangnya kebenaran, melainkan pada melemahnya komitmen kolektif untuk menundukkan opini, emosi, dan kepentingan pada fakta objektif. Fakta tetap ada, tetapi tidak lagi mengikat. Dalam situasi ini, klaim kebenaran tidak dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan realitas, melainkan berdasarkan daya afektif, kesesuaian identitas, atau manfaat strategisnya. Di sinilah *post-truth* bertransformasi dari problem epistemik menjadi krisis moral dan sosial.

Akar persoalan *post-truth*, oleh karena itu, tidak terletak terutama pada teknologi, melainkan pada pergeseran struktur kesadaran epistemik dan moral manusia modern. *Post-truth* mencerminkan melemahnya kesepakatan epistemik bersama tentang apa yang dapat disebut sebagai klaim kebenaran yang sah secara publik. Ketika kebenaran faktual tidak lagi berfungsi sebagai horizon bersama, melainkan diprivatisasi ke dalam afiliasi kelompok, identitas politik, atau resonansi emosional, maka ruang publik kehilangan dasar normatifnya. Dalam konteks ini, kebenaran tidak lagi dicari melalui pengujian rasional terhadap fakta objektif, melainkan digunakan sebagai instrumen afirmasi diri dan legitimasi kekuasaan. Fragmentasi realitas bersama inilah yang menjadi fondasi terdalam fenomena *post-truth*.

Pergeseran epistemik ini memiliki implikasi langsung pada ranah moral. Ketika kebenaran faktual kehilangan otoritas normatifnya, kategori benar-salah dalam tindakan sosial pun ikut tererosi. Yang dimaksud dengan “benar” tidak lagi berakar pada prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, melainkan pada kalkulasi pragmatis, kepentingan politik, atau intensitas emosi kolektif. Dalam arti ini, yang mengalami krisis bukan hanya kebenaran sebagai korespondensi, tetapi juga kebenaran sebagai dasar penilaian moral. Fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* memperparah kondisi ini dengan menutup kemungkinan koreksi berbasis fakta, sehingga individu semakin terkurung dalam narasi yang meneguhkan keyakinannya sendiri (Jauernig et al., 2022). *Post-truth* dengan demikian menghasilkan bukan hanya disorientasi kognitif, tetapi juga krisis pembentukan karakter moral.

Dampak krisis ini bersifat berlapis. Pada tingkat individual, subjek mengalami kebingungan normatif karena kehilangan kerangka evaluatif yang stabil untuk menilai informasi dan tindakan. Pada tingkat sosial, ruang publik bergeser dari arena penilaian rasional berbasis fakta menjadi medan konflik narasi yang saling menegasikan. Polarisasi politik, tribalisme digital, dan normalisasi disinformasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi disatukan oleh komitmen bersama terhadap kebenaran faktual. Sementara itu, pada tingkat institusional, otoritas pengetahuan, baik sains, hukum, maupun agama mengalami delegitimasi karena dipersepsikan tidak lebih dari sekadar opini yang bersaing di pasar narasi.

Berbagai penelitian empiris mengonfirmasi dampak destruktif kondisi ini. Enroth menunjukkan bahwa paparan informasi palsu tidak hanya memengaruhi penilaian kognitif, tetapi juga evaluasi moral dan keputusan sosial individu (Enroth, 2023). Haslam dan Loughnan menegaskan bahwa dimensi kemanusiaan seperti empati, keadilan, dan tanggung jawab dapat tereduksi ketika individu terus-menerus terpapar narasi manipulatif (Haslam & Loughnan, 2014). Selain itu, Vosoughi, Roy, & Aral serta Lewandowsky et al. menemukan bahwa dominasi narasi pragmatis dan polarisasi informasi di media sosial tidak hanya melemahkan integritas moral individu, tetapi juga menimbulkan fragmentasi sosial yang memperkecil ruang dialog etis (Vosoughi et al., 2018; Lewandowsky et al., 2017). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek psikologis, sosiologis, dan kognitif, sementara dimensi filosofis tentang bagaimana krisis ini berakar pada struktur kesadaran moral manusia relatif kurang dieksplorasi.

Di sinilah filsafat Hegel menawarkan relevansi yang signifikan untuk mendiagnosis krisis *post-truth* secara lebih mendalam. Alih-alih memahami problem moral sebagai kegagalan individual atau defisit kognitif semata, Hegel menempatkan moralitas dalam kerangka kehidupan etis yang bersifat sosial, historis, dan terinstitusionalisasi. Moralitas bukan sekadar kumpulan aturan eksternal atau pilihan subjektif personal, melainkan hasil dari relasi dialektis antara kehendak individu dan tatanan kehidupan bersama yang rasional (Wood, 2012, hlm. 108). Dari perspektif ini, krisis *post-truth* dapat dibaca sebagai gejala keterputusan antara subjektivitas individu dan struktur etis kolektif yang seharusnya menopang kebenaran publik.

Lebih jauh, Hegel menegaskan bahwa kontradiksi sosial, termasuk ketegangan antara fakta dan opini, antara klaim universal dan kepentingan partikular bukanlah anomali yang sekadar mengganggu keteraturan moral, melainkan momen inheren dalam perkembangan kesadaran etis itu sendiri (Lazarus, 2025). Ketika kontradiksi tersebut tidak diolah dalam kerangka kehidupan etis yang rasional, ia memproduksi alienasi, fragmentasi sosial, dan disintegrasi kepercayaan publik. Namun, ketika kontradiksi dihadapi secara reflektif melalui institusi dan praktik etis bersama, ia justru menjadi sarana pembentukan kebebasan yang lebih matang. Dalam arti ini, *post-*

truth tidak hanya menandai kemerosotan moral, tetapi mengungkap kegagalan struktur etis dalam mengintegrasikan kebebasan subjektif dengan tanggung jawab sosial.

Bertolak dari kerangka tersebut, artikel ini mengusung tesis bahwa “jalan keluar” atas krisis *post-truth* terutama harus dicari dalam etika *Sittlichkeit*, yakni dalam kehidupan etis yang terinstitusionalisasi. *Sittlichkeit*, dalam sistem filsafat Hegel, merupakan horizon konkret tempat kebebasan menjadi nyata, bukan sebagai klaim kebenaran privat atau niat subjektif semata, melainkan sebagai praktik hidup yang dibentuk, diuji, dan dipertahankan dalam relasi sosial yang rasional. Dengan kata lain, solusi terhadap *post-truth* tidak terletak pada koreksi epistemik individual semata, melainkan pada pemulihan kemampuan manusia untuk *menari bersama* dalam tatanan etis yang sama.

Dalam kerangka ini, konsep-konsep Hegelian lain seperti *Geist* dan *Bildung* tidak diangkat sebagai fokus analisis yang berdiri sendiri, melainkan dipahami sebagai dimensi internal dari *Sittlichkeit* itu sendiri. *Geist* menunjuk pada karakter intersubjektif kesadaran etis yang memungkinkan koordinasi gerak moral antarindividu, sementara *Bildung* merujuk pada proses formasi historis yang melatih subjek agar mampu menginternalisasi dan menghidupi norma-norma etis tersebut. Keduanya bukan tujuan otonom, melainkan proses yang menghidupkan dan menopang *Sittlichkeit*. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai *Sittlichkeit* dengan sendirinya akan menyentuh peran *Geist* dan *Bildung* tanpa perlu menempatkannya sebagai konsep yang setara secara sistematis.

Berdasarkan asumsi ini, penelitian ini bertujuan menjembatani kajian empiris mengenai *post-truth* dengan refleksi filosofis tentang krisis moral dalam masyarakat modern. Fokus utama artikel ini adalah menunjukkan bagaimana problem *post-truth* berakar pada melemahnya kehidupan etis yang terinstitusionalisasi, serta bagaimana konsep *Sittlichkeit* dapat memberikan kerangka normatif sekaligus praktis untuk memulihkan orientasi moral individu dan kolektif. Dengan menelusuri tiga momen utama *Sittlichkeit* seperti keluarga, masyarakat sipil, dan negara, artikel ini berupaya memperlihatkan secara konkret bagaimana pembentukan karakter dan pemeliharaan kebenaran publik harus berlangsung dalam setiap ranah kehidupan etis tersebut.

Akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa krisis *post-truth* tidak dapat diatasi melalui solusi teknis atau moralistik semata. Ia menuntut rekonstruksi kehidupan etis yang memungkinkan kebebasan dan kebenaran bergerak bersama. Dalam horizon Hegelian, kebebasan hanya sungguh-sungguh nyata ketika dihidupi dalam *Sittlichkeit* dalam relasi yang saling mengakui, dalam praktik sosial yang bertanggung jawab, dan dalam institusi rasional yang menjaga kebenaran publik. Menari bersama Hegel di era *post-truth*, dengan demikian, berarti belajar menghidupi kebebasan bukan melawan yang lain, tetapi *bersama yang lain*, dalam tatanan etis yang memungkinkan kebenaran tetap tegak di tengah tarik-menarik narasi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) (Zed, 2008, hlm. 14), yang dilakukan melalui telaah literatur primer maupun sekunder yang relevan dengan isu *post-truth*, pendidikan karakter, serta filsafat Hegel. Literatur yang digunakan meliputi karya-karya klasik Hegel, kajian kontemporer tentang dialektika, serta penelitian empiris mengenai dampak sosial dan moral dari *post-truth*. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutis-dialektis, yaitu membaca, menginterpretasi, dan mengkritisi teks-teks tersebut dalam kerangka dialektika Hegel. Proses dialektis ini menempatkan kontradiksi—antara fakta dan opini, antara moralitas individual dan kehidupan etis kolektif—sebagai bahan refleksi untuk menghasilkan sintesis konseptual yang lebih tinggi. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menekankan deskripsi literatur, tetapi juga usaha filosofis untuk menemukan relevansi pemikiran Hegel bagi pengembangan karakter di era *post-truth*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Post-Truth dan Krisis Moral

Fenomena *post-truth*, sebagaimana ditegaskan Miroslav Vacura, dapat dipahami sebagai sinonim dari *post-fact* dan *post-reality*, yakni suatu kondisi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi penentu utama dalam pembentukan opini publik (Vacura, 2020). Fakta dan narasi diproduksi secara strategis, emosi lebih dominan daripada rasionalitas, dan aktor sosial-politik sering kali mengabaikan bukti. Kondisi ini menandai pergeseran mendasar: kebenaran tidak lagi diperlakukan sebagai fondasi bersama, melainkan sebagai instrumen retorik yang dapat diputar sesuai kepentingan. Vacura menguraikan tiga penyebab utama *post-truth*: *pertama*, perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang mempercepat arus informasi tanpa filter; *kedua*, perubahan ekonomi-politik global yang menimbulkan ketidakstabilan; dan *ketiga*, warisan filsafat postmodernisme yang merelatifkan klaim kebenaran akademis maupun sosial (Vacura, 2020).

Postmodernisme, dengan penekanan pada relativitas dan dekonstruksi, pada mulanya menawarkan kritik penting terhadap dominasi ideologi tertentu. Namun dalam praktik sosial kontemporer, ia sering bergeser menjadi nihilisme epistemik: tidak ada kebenaran absolut, setiap klaim hanyalah konstruksi ideologis. Hasilnya, fakta ilmiah sering diperlakukan sejajar dengan opini subjektif, sementara moralitas direduksi menjadi kalkulasi pragmatis, yang benar adalah yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu (Long et al., 2021). Situasi ini melahirkan ruang sosial di mana emosi lebih dihargai daripada objektivitas, dan narasi populer yang menyenangkan atau menghibur massa lebih cepat diterima daripada data faktual yang menuntut refleksi kritis.

Rommetveit menambahkan bahwa teknologi digital memperparah kondisi ini dengan mengaburkan batas antara fakta dan nilai, manusia dan mesin, serta ilmu pengetahuan dan politik. Algoritma media sosial menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble* yang membuat orang hanya berinteraksi dengan informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri (Rommetveit, 2022). Akibatnya, terbentuklah realitas paralel yang sulit dijembatani, di mana klaim kebenaran tidak lagi diuji bersama, melainkan dikukuhkan secara tribal dalam kelompok yang homogen. Fenomena ini selaras dengan temuan Vosoughi, Roy, & Aral bahwa berita bohong justru menyebar lebih cepat daripada berita benar, karena daya tarik emosionalnya yang lebih besar (Vosoughi et al., 2018).

Dalam kerangka ini, Simon menegaskan bahwa *post-truth* berakar pada kesadaran egologis, kesadaran yang terpusat pada diri sendiri, tertutup terhadap orang lain, dan menolak nilai intersubjektif (Simon, 2020). Kebenaran tidak lagi diupayakan dalam dialog, tetapi dalam afirmasi diri. Akibatnya, krisis moral tak terhindarkan: nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab tidak lagi dihormati. Sebaliknya, ruang publik dipenuhi budaya saling curiga, ujaran kebencian, intoleransi, bahkan kekerasan sosial. Effron & Helgason memperkuat gambaran ini dengan menunjukkan bahwa kebohongan politik atau disinformasi tidak hanya dipercaya, tetapi juga dimaafkan, bahkan dinormalisasi (Effron & Helgason, 2022). Standar moral melemah: kebohongan tidak dianggap salah jika menguntungkan kelompok tertentu, disampaikan dengan retorika meyakinkan, atau diulang terus-menerus hingga terasa wajar.

Fenomena ini mencerminkan apa yang digambarkan Vogelmann, bahwa *post-truth* adalah situasi ketika kebenaran tidak lagi menjadi fondasi utama kehidupan publik, melainkan digantikan oleh opini dan emosi (Vogelmann, 2018). Politik kehilangan arah etis, ruang publik kehilangan legitimasi sebagai arena pencarian kebenaran bersama, dan masyarakat terbiasa menerima kebohongan sebagai “fakta alternatif.” Lebih jauh lagi, Austad menyoroti bahwa batas benar dan salah menjadi kabur, sehingga individu merasa bebas membangun “kebenaran” versinya sendiri (Austad, 2001). Ambiguitas moral ini berakibat serius: perilaku yang semestinya dianggap salah dapat dengan mudah dinormalkan jika sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompok dominan.

Krisis ini semakin jelas bila dilihat dari sudut pandang otoritas sosial. Enroth menunjukkan bahwa krisis *post-truth* sejatinya adalah krisis otoritas: runtuhnya kepercayaan terhadap institusi-institusi pengetahuan dan moral (sains, hukum, agama, bahkan negara) (Enroth, 2023). Otoritas tidak lagi dihormati, melainkan dipandang sebagai “satu versi kebenaran di antara yang lain.” Akibatnya, institusi yang seharusnya berfungsi sebagai penopang kebenaran kolektif kehilangan legitimasi moralnya. Hal ini sejalan dengan analisis Lewandowsky et al. bahwa masyarakat *post-truth* kehilangan kemampuan membedakan informasi valid dan hoaks karena absennya otoritas epistemik yang diakui bersama (Lewandowsky et al., 2017).

Dari perspektif psikologi sosial, penyebaran disinformasi memiliki dimensi emosional yang kuat. Studi terbaru menunjukkan bahwa hoaks yang memicu emosi moral negatif, seperti kemarahan atau rasa bersalah, lebih mudah viral daripada informasi yang netral (Jauernig et al., 2022). Dengan kata lain, *post-truth* bukan hanya persoalan kognitif, tetapi juga persoalan afektif: opini yang kuat bukan hasil perenungan kritis, melainkan hasil resonansi emosional. Fenomena ini mempertegas bahwa krisis *post-truth* adalah krisis moral, karena emosi, bukan integritas, menjadi fondasi pengambilan keputusan etis.

Dari seluruh analisis ini, jelas bahwa *post-truth* bukan sekadar problem epistemologis, pertanyaan tentang bagaimana manusia mengetahui kebenaran, melainkan problem moral yang mengguncang fondasi kehidupan bersama. Ia bukan hanya krisis informasi, melainkan krisis integritas. Ketika masyarakat tidak lagi memiliki standar bersama untuk menilai benar dan salah, kebenaran berubah menjadi komoditas, politik kehilangan arah etis, dan karakter manusia menjadi rapuh. *Post-truth* dengan demikian adalah bentuk baru krisis peradaban: krisis yang bukan hanya mengaburkan relasi antara fakta dan opini, tetapi juga melemahkan komitmen manusia pada nilai-nilai moral yang menopang keberlangsungan hidup bersama (Austad, 2001, hlm. 120).

Dari Krisis Moral ke Krisis Karakter: *Post-Truth* dan Ancaman bagi Kemanusiaan

Dampak Krisis *post-truth* bukan sekadar problem epistemologis yang berkaitan dengan cara manusia mengetahui kebenaran, melainkan juga problem etis yang mengguncang fondasi kemanusiaan. Fenomena ini meruntuhkan orientasi moral dan mengikis pembentukan karakter yang sehat. Jika moralitas adalah horizon nilai

yang memberi arah bagi kehidupan bersama, maka karakter merupakan aktualisasi konkret dari nilai itu dalam tindakan sehari-hari. Karena itu, krisis moral dalam era *post-truth* tak terelakkan berkembang menjadi krisis karakter.

Austad mengidentifikasi dua faktor utama: pertama, hilangnya kompas moral, sehingga nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dikorbankan demi kepentingan sesaat; kedua, jebakan *echo chamber* digital yang memutuskan individu dari fakta bersama dan menggantinya dengan “realitas” yang diproduksi secara tribal (Austad, 2001, hlm. 121-22). Riset terbaru dari Wardle & Derakhshan tentang ekologi disinformasi menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar kebingungan informasi, melainkan pergeseran radikal dalam cara manusia membangun makna sosial (Wardle & Derakhshan, 2017). Alih-alih kebenaran bersama, masyarakat kini ditopang oleh narasi kompetitif yang dipertahankan demi kepentingan politik atau identitas.

Akibatnya, solidaritas sosial semakin melemah. Sunstein dalam *Republic.com* menyoroti bagaimana algoritma media sosial secara sistematis membatasi horizon epistemik, membuat warga hanya berinteraksi dengan informasi yang mengonfirmasi preferensinya (Sunstein, 2001, hlm. 23). Hal ini memunculkan “ruang gema” (*echo chamber*) yang bukan hanya memisahkan, tetapi juga menutup kemungkinan koreksi. Fragmentasi epistemik ini berujung pada fragmentasi moral: masyarakat kehilangan fondasi etis bersama, dan karakter individu pun tercerabut dari kesadaran kolektif.

Padahal, kemanusiaan manusia tidak pernah hanya bersifat kognitif. Manne menekankan bahwa manusia adalah makhluk kreatif, berpikir, sekaligus bermoral, yang hidup dalam jaringan emosi, relasi, dan tanggung jawab (Manne, 2016, hlm. 55). Haslam & Loughnan menambahkan bahwa *humanness* adalah spektrum yang mencakup dimensi positif (empati, kasih sayang, etika) sekaligus sisi gelap (egoisme, kekejaman, manipulasi) (Haslam & Loughnan, 2014). Dalam konteks *post-truth*, sisi gelap ini justru diperkuat. Disinformasi tidak hanya memanipulasi opini, tetapi juga mengikis empati dan menormalisasi kebohongan (Effron & Helgason, 2022).

Lebih jauh, teknologi modern memperparah krisis karakter. Huang & Rust menegaskan bahwa martabat manusia sedang “dikikis secara sistematis” oleh penetrasi digital (Huang & Rust, 2018). Sherry Turkle dalam *Alone Together* menyoroti paradoks ini: semakin terhubung secara virtual, manusia justru semakin terasing secara eksistensial (Turkle, 2011). Tegmark memperdalam dilema tersebut: kecerdasan buatan kini mampu meniru empati dan kreativitas—dua hal yang selama ini dianggap inti kemanusiaan (Tegmark, 2017).

Krisis ini juga memperlihatkan bahwa moralitas tak lagi dijalani melalui refleksi kritis, tetapi melalui emosi instan yang dimobilisasi. Solovev dan Pröllochs menemukan bahwa berita bohong jauh lebih cepat menyebar ketika dikaitkan dengan emosi moral seperti kemarahan atau jijik (Solovev & Pröllochs, 2022). Dengan kata lain, integritas manusia bukan hanya tergoda, tetapi secara struktural dilemahkan oleh ekosistem digital. Refleksi filosofis Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan terasa relevan: kejahatan besar bisa lahir bukan karena kebencian mendalam, tetapi karena ketiadaan refleksi moral (Arendt, 1971, hlm. 29). Di era *post-truth*, banalitas itu muncul dalam bentuk “berbagi tanpa berpikir,” di mana tindakan sederhana menyebarkan hoaks justru berkontribusi pada rusaknya ruang publik.

Dari perspektif sosiologi, krisis karakter ini memperlihatkan kehancuran institusi yang seharusnya menopang pembentukan etika. Mead dan Blumer menekankan pentingnya interaksi simbolik dalam membentuk identitas, sementara Parsons menekankan peran norma kolektif dalam menjaga stabilitas sosial. Namun, riset Lewandowsky et al. menunjukkan bahwa otoritas epistemik institusional (misalnya akademik, media, atau hukum) kini melemah drastis akibat banjir disinformasi. Dengan kata lain, individu kehilangan “cermin sosial” yang dapat menguji dan memperbaiki pandangannya (Lewandowsky et al., 2017).

Dari perspektif psikologi moral, Decety & Cowell menegaskan bahwa empati dan kesadaran diri adalah kunci pembentukan perilaku etis (Decety & Cowell, 2015). Namun, kondisi *post-truth* menekankan tribalitas emosional yang memperkuat batas kelompok dan memperlemah empati lintas identitas. Dalam kerangka ini, karakter tidak lagi berfungsi sebagai disposisi moral universal, melainkan sebagai mekanisme tribal untuk melindungi “kita” dan melawan “mereka.”

Krisis ini menyingkap bahwa pendidikan karakter konvensional, yang hanya berfokus pada transfer nilai positif, tidak lagi memadai. Tantangannya bukan hanya bagaimana mengajarkan kejujuran atau tanggung jawab, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran kritis yang mampu menghadapi narasi manipulatif. Bajwa & Ng mengingatkan bahwa inti karakter bukan pada perilaku eksternal semata, tetapi pada niat dan integritas batin yang terus diuji dalam situasi kompleks (Bajwa & Ng, 2025). Artinya, pendidikan karakter di era *post-truth* harus melibatkan disiplin reflektif, kemampuan menahan diri, dan keberanian moral untuk menolak narasi yang menyesatkan, bahkan ketika narasi itu populer atau menguntungkan secara pragmatis.

Pada akhirnya, krisis karakter ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan moralitas atomistik. Selama karakter dipahami hanya sebagai kualitas privat, maka ia akan rapuh di hadapan arus besar narasi publik yang manipulatif. Kita membutuhkan kerangka filosofis yang lebih luas, yang mampu melihat karakter sebagai formasi intersubjektif, historis, dan sosial. Di sinilah relevansi Hegel muncul. Hegel menolak memisahkan individu dari

komunitas, subjek dari objek, atau moralitas dari sejarah. Baginya, karakter terbentuk melalui dialektika: melalui negasi, konflik, dan rekonsiliasi yang membuka jalan menuju kebebasan etis yang lebih tinggi.

Dengan demikian, dari krisis *post-truth* yang telah mereduksi kebenaran menjadi klaim privat, kita perlu bergerak menuju horizon filosofis yang lebih kokoh. Hegel menawarkan kerangka tersebut melalui konsep dialektika subjek-objek, *Geist*, *Bildung*, dan *Sittlichkeit*. Semua ini bukan sekadar abstraksi metafisik, melainkan jalan praktis untuk memahami bagaimana karakter manusia dapat dipulihkan melalui dinamika sosial dan etis.

Menari Bersama Hegel: Sebuah Upaya Pengembangan Karakter Di Era *Post-truth*

Epistemologi Hegel dan Dialektika Subjek-Objek

Dalam sejarah filsafat modern, relasi antara subjek dan objek kerap dipahami secara terpisah. Kant, misalnya, menegaskan bahwa pengetahuan manusia selalu dibatasi oleh struktur apriori subjek, sehingga dunia sebagaimana adanya (*das Ding an sich*) tidak pernah sepenuhnya terjangkau. Meskipun revolusioner, pendekatan ini, menurut Hegel menyisakan problem mendasar terkait relasi subjek dan objek yang dibekukan dalam batas refleksi epistemologis dan gagal menjelaskan bagaimana kesadaran berkembang secara historis dan sosial (Giacché, 2020).

Hegel menolak pemisahan statis tersebut. Baginya, pengetahuan bukan hasil korespondensi pasif antara subjek dan objek, melainkan proses dialektis yang hidup. Subjek dan objek saling menegaskan dan memediasi satu sama lain dalam gerak rasional yang berkelanjutan (Hegel, 1977). Dialektika inilah yang menjadi jantung filsafat Hegel: suatu gerak yang tidak hanya metodologis, tetapi juga ontologis, karena merefleksikan dinamika realitas itu sendiri (Saumantri, 2023).

Dari kerangka ini, kita dapat menyoroti tiga aspek utama pemikiran Hegel mengenai relasi subjek dan objek. Pertama, bagaimana rasio dan dialektika menjadi medium interaksi antara subjek dan objek; kedua, bagaimana spirit individu berkembang menuju lingkup universal; dan ketiga, bagaimana kesatuan subjek dan objek terwujud dalam pengalaman nyata. Ketiga aspek ini membentuk kerangka dialektika Hegel yang dinamis, menghubungkan pemahaman rasional dengan realitas sosial dan moral.

1. Rasio dan Dialektika Subjek-Objek

Bagi Hegel, subjek dan objek tidak dapat dipisahkan. Mereka saling berdialektika melalui rasio yang mengarah pada pemahaman lebih universal, dimediasi oleh *Geist* (roh/jiwa/semangat) yang menjadi prinsip kesatuan keduanya. Proses dialektika ini berlangsung melalui siklus tesis–antitesis–sintesis: tesis sebagai kondisi awal, antitesis sebagai negasi, dan sintesis sebagai rekonsiliasi yang lebih tinggi. Misalnya, seorang penjahat yang mengakui kesalahannya (tesis) berhadapan dengan hakim yang memberi pengampunan (antitesis), melahirkan rekonsiliasi dan perdamaian (sintesis) (Al Azis, 2021). Negasi dan kontradiksi di sini bukan hambatan, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam.

2. Dari Spirit Individual ke Universal

Hegel menegaskan bahwa moralitas tidak berhenti di ranah privat. Spirit dalam diri individu harus bergerak ke keluarga, masyarakat, dan akhirnya negara. Yang partikular harus selalu ditransformasikan menuju yang universal. Contohnya, individu yang hanya mementingkan dirinya (partikular) akan mengalami konflik dengan kepentingan orang lain. Melalui hukum, norma, dan nilai sosial (antitesis), ia belajar keluar dari keterpusatan diri, hingga menemukan sintesis dalam keterlibatan sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara (Amanda, 2024). Dengan demikian, kesadaran moral selalu terkait dengan realitas sosial yang lebih luas.

3. Kesatuan Subjek dan Objek

Berbeda dengan sains modern yang memisahkan subjek dan objek, Hegel melihat keduanya bersatu dalam dialektika. Subjek memahami dirinya melalui perjumpaan dengan objek, dan objek bermakna melalui pengalaman subjek. Seorang seniman, misalnya, tidak dapat memahami identitas dirinya tanpa karya seni yang ia hasilkan (objek), dan karya seni itu hanya bermakna jika ditafsirkan dan dihidupi oleh sang seniman maupun orang lain. Dalam perjumpaan ini, *Geist* menjadi perekat yang menyatukan partikularitas ke dalam kesatuan universal sekaligus sumber moralitas.

Dialektika subjek-objek ini menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan moralitas bukanlah urusan individual yang terisolasi, tetapi berkembang secara historis, sosial, dan etis. Dari sini, Hegel memperluas refleksinya ke konsep yang lebih konkret dan aplikatif: *Geist*, sebagai roh kolektif yang memandu perkembangan individu dan masyarakat; *Bildung*, sebagai proses pembentukan diri dan pengembangan kapasitas moral; dan *Sittlichkeit*, sebagai realisasi etika dalam kehidupan sosial yang konkret melalui keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan kata lain, pemahaman tentang dialektika subjek-objek membuka jalan bagi analisis lebih mendalam tentang bagaimana individu, pendidikan, dan kehidupan etis saling menari dalam totalitas kehidupan Hegelian

Namun, penting ditegaskan sejak awal bahwa bagi Hegel, dialektika subjek–objek tidak berhenti pada tataran kesadaran individual. Justru dari sinilah ia bergerak menuju persoalan yang lebih konkret tentang bagaimana kesadaran, rasionalitas, dan kebebasan menemukan bentuk nyatanya dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, dialektika epistemologis membuka jalan menuju persoalan etis dan sosial, yakni *Sittlichkeit* sebagai aktualisasi kebebasan.

Dari Dialektika Kesadaran menuju Kehidupan Etis

Era *post-truth* ditandai oleh krisis kesadaran kolektif: fakta terpinggirkan oleh opini emosional, ruang publik terfragmentasi, dan individu kian terjebak dalam gelembung informasi (*echo chamber*) yang menutup diri dari koreksi (Kingham, 2020, hlm. 235). Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas diskursus publik, tetapi secara lebih mendasar menggerogoti karakter moral, sebab individu kehilangan orientasi etis ketika kebenaran direduksi menjadi klaim privat atau kepentingan kelompok. Dalam perspektif Hegelian, fenomena ini tidak dapat dipahami sebagai sekadar kegagalan epistemik individual, melainkan sebagai kegagalan struktur kesadaran sosial yang menopang kehidupan bersama.

Dalam kerangka Hegelian, kesadaran tidak pernah berdiri sendiri sebagai entitas privat. Kesadaran selalu terbentuk, dimediasi, dan diuji dalam relasi historis, bahasa, norma, dan praktik sosial. Hegel secara tegas menolak reduksi kesadaran menjadi sekadar *awareness* pasif terhadap objek; setiap bentuk persepsi dan pengetahuan selalu sudah terjatuh dalam struktur sosial yang diwariskan secara historis (Hegel, 1977). Dengan demikian, krisis *post-truth* tidak dapat dijelaskan hanya sebagai masalah “kurang informasi,” tetapi harus dibaca sebagai krisis ruang sosial yang membentuk kesadaran itu sendiri. Fakta dikalahkan oleh opini emosional bukan semata karena lemahnya rasio individual, melainkan karena rapuhnya kehidupan etis yang seharusnya membentuk, mengoreksi, dan meneguhkan kesadaran.

Di titik inilah konsep *Geist* memperoleh relevansi kritis. Bagi Hegel, *Geist* bukan kesadaran individual yang terisolasi, melainkan kesadaran intersubjektif yang lahir dari relasi dialektis antara individu, komunitas, dan dunia historisnya (Hegel, 1977). “Aku” hanya menjadi subjek sejauh ia diakui dalam “kita”; identitas moral selalu dibentuk melalui relasi pengakuan (*Anerkennung*). Prinsip ini menunjukkan bahwa karakter tidak mungkin dibangun secara soliter, melainkan selalu melalui internalisasi nilai, norma, dan praktik bersama. Oleh karena itu, krisis karakter di era *post-truth* dapat dibaca sebagai krisis relasi sosial, yang mana kesadaran individu tercerabut dari koreksi dan peneguhan komunitas, sehingga klaim kebenaran jatuh menjadi ekspresi afektif, preferensi privat, atau identitas kelompok yang tertutup.

Lebih jauh, Hegel menunjukkan bahwa pelemahan *Geist* bukan sekadar penyimpangan moral individual, melainkan kegagalan roh sosial dalam menjalankan fungsi normatifnya. Ketika kesadaran berhenti pada kepastian subjektif (*Gewissheit*) dan tidak bergerak menuju kebenaran objektif (*Wahrheit*), ruang publik kehilangan daya korektif rasionalnya (Hegel, 1977). Dalam konteks *post-truth*, hal ini tampak ketika narasi manipulatif, distorsi algoritmik, dan bias komunitas digital membentuk kesadaran yang menyimpang. Tanpa *Geist* yang hidup, kesadaran mudah terjebak dalam *echo chamber* yang memperkuat bias dan menutup diri dari rasionalitas publik.

Dalam kerangka ini, Hegel juga menekankan performativitas tindakan sadar. Setiap tindakan bukan sekadar ekspresi subjektif, melainkan realisasi objektif identitas moral, yaitu “*doing so, makes it so*” (Hegel, 1977, hlm. 72-79). Menolak menyebarkan informasi yang meragukan, misalnya, bukan hanya keputusan teknis, tetapi pernyataan etis yang mengukuhkan integritas diri. Karakter, dengan demikian, tidak dibentuk oleh teori moral semata, melainkan oleh konsistensi tindakan etis yang diuji dalam praktik sosial sehari-hari.

Kerangka ini semakin jelas jika kita mengingat perbedaan Hegel antara *an sich* (potensi generik) dan *für sich* (aktualisasi nyata). Nilai moral yang diketahui secara abstrak hanyalah tahap awal; ia baru menjadi karakter ketika diwujudkan dalam tindakan konkret (Stekeler-Weithofer, 2020). Seorang anak mungkin paham definisi kejujuran, tetapi karakter jujur hanya terbukti ketika ia berani berkata benar meski berisiko. Era *post-truth* memperlebar jurang antara *an sich* dan *für sich*: banyak orang tahu berita bohong berbahaya, tetapi tetap menyebarkannya demi kepentingan. Karena itu, pendidikan karakter harus berfungsi sebagai jembatan yang mengubah kesadaran generik menjadi praksis nyata.

Namun, *Geist* tidak hadir secara otomatis atau alamiah dalam diri individu. Kesadaran intersubjektif yang menopang kehidupan etis tidak muncul begitu saja sebagai hasil keberadaan sosial, melainkan dibentuk melalui proses historis yang panjang, berlapis, dan sering kali penuh ketegangan. Proses inilah yang oleh Hegel dipahami sebagai *Bildung*. Dengan istilah ini, Hegel menunjuk pada formasi diri yang bersifat dialektis, yaitu sebuah perjalanan kesadaran dari keterlekatan awal pada *immediacy* menuju kebebasan rasional yang diperoleh secara reflektif.

Bildung tidak dapat direduksi menjadi pendidikan formal (*Ausbildung*) atau sekadar akumulasi kebudayaan (*Kultur*). Seperti ditegaskan Marina F. Bykova, intensitas dan frekuensi penggunaan istilah *Bildung* dalam karya-

karya Hegel, yang jauh melampaui istilah pedagogis lainnya menunjukkan bahwa ia memegang peranan fundamental dalam keseluruhan kerangka Hegelian (Bykova, 2020, hlm. 425). *Bildung* merujuk pada proses formasi roh (*spirit*) itu sendiri, yaitu suatu proyek sosial-historis di mana individu membentuk identitas rasional dan etisnya dengan menginternalisasi, menguji, dan mereinterpretasi nilai-nilai serta institusi yang membentuk komunitasnya. Dalam pengertian ini, *Bildung* bukan sekadar sarana pendidikan, melainkan medium ontologis bagi pembentukan subjek etis.

Secara historis, terangnya posisi *Bildung* tak dapat dilepaskan dari warisan neo-humanisme Jerman, yaitu tokoh seperti Herder (Herder, 1787) dan Wilhelm von Humboldt (Humboldt, 1903) yang menekankan pembentukan diri sebagai tujuan fundamental pendidikan. Forster menunjukkan bagaimana tradisi ini menempatkan pengembangan pribadi dalam konteks sejarah dan kebudayaan; Hegel kemudian mengolah dan meradikalisasi warisan tersebut dengan menempatkan *Bildung* dalam horizon roh obyektif yang bersifat historis (Forster, 1998, hlm. 75-80). Peralihan ini penting karena menandai bahwa *Bildung* menurut Hegel bukan proyek individual terisolasi melainkan proyek sosial-historis: individu membentuk dirinya dengan menginternalisasi dan sekaligus mereinterpretasi jejak-jejak budaya serta institusi yang membentuk komunitasnya. Karena itu, pembicaraan tentang pendidikan karakter tidak boleh dilepaskan dari konteks historis-kultural di mana subjek tumbuh.

Bykova menyebut *Bildung* sebagai “*a fundamental, social-historical project of the spirit’s self-cultivation, a path toward rational autonomy and actively attained freedom from natural immediacy of life*” (Bykova, 2020). Rumusan ini menegaskan bahwa kebebasan tidak diberikan secara instan, melainkan dicapai melalui kerja historis yang melibatkan konflik, ketegangan, dan rekonsiliasi. Dengan demikian, pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kegagalan, perdebatan, dan krisis identitas; justru melalui momen-momen inilah kesadaran memperoleh kedalaman etis dan ketahanan normatif.

Lebih lanjut, *Bildung* bekerja dalam beberapa lapisan yang saling menopang. *Pertama*, melalui pendidikan formal, ia menumbuhkan kapasitas rasional kritis yang memungkinkan individu mengambil jarak dari kondisi langsung dan menilai klaim kebenaran secara reflektif (de Vries, 1988, hlm. 401). *Kedua*, melalui formasi kultural, *Bildung* membentuk disposisi moral lewat praktik seni, bahasa, dan diskursus publik yang mengasah empati serta kepekaan normatif. *Ketiga*, melalui apropriasi historis, individu menjadi pembawa sekaligus pengolah tradisi, bukan sekadar pewaris pasif sehingga mampu mengaitkan identitas personalnya dengan gerak kebebasan kolektif (Ham et al., 2023). Tanpa sinergi ketiga dimensi ini, pembentukan karakter mudah tereduksi menjadi moralitas dangkal atau kepatuhan teknis semata (Bykova, 2020, hlm. 426-427).

Dengan demikian, *Bildung* menyediakan mekanisme konkret untuk membangun ketahanan etis terhadap manipulasi naratif khas era *post-truth*. Ia melatih kesadaran untuk tidak berhenti pada keyakinan privat, tetapi mengujinya dalam ruang sosial yang sarat konflik dan pengakuan. Namun demikian, penting ditegaskan bahwa *Bildung*, betapapun sentralnya, tetap belum merupakan tujuan akhir kebebasan. Tanpa bentuk objektif yang mengikat dan berkelanjutan, *Bildung* berisiko berhenti sebagai proyek individual yang terfragmentasi, sementara *Geist* dapat menguap menjadi kesadaran kolektif yang cair dan tak stabil.

Jawaban Hegel atas persoalan ini terletak pada *Sittlichkeit*. Dalam kehidupan etis yang terinstitusionalisasi, seperti keluarga, masyarakat sipil, dan negara, *Geist* menemukan bentuk objektifnya dan *Bildung* mencapai aktualitasnya. Di sinilah kebebasan tidak lagi sekadar disposisi internal, melainkan realitas yang dihidupi, diuji, dan dipertanggungjawabkan dalam struktur kehidupan bersama yang rasional.

‘Sittlichkeit’: Kehidupan Etis sebagai Aktualisasi Kebebasan

Jika *Geist* menyingkapkan hakikat kesadaran sebagai relasi intersubjektif dan *Bildung* menunjukkan proses formasi diri dialektis yang berlangsung dalam sejarah, maka *Sittlichkeit* menghadirkan titik kulminasi di mana kebebasan menemukan bentuknya yang paling konkret, stabil, dan dapat dihidupi. Dalam kerangka ini, Hegel secara tegas membedakan *Sittlichkeit* dari *Moralität*. *Moralität* menekankan dimensi subjektif: individu merefleksikan tindakan, menimbang baik dan buruk berdasarkan suara hati, dan berusaha mempertahankan konsistensi moral personal (Hegel, 1974, hlm 330-331). Namun, bagi Hegel, dimensi ini belum memadai untuk menopang kehidupan etis dalam masyarakat modern. Kebebasan sejati tidak cukup dipahami sebagai niat baik atau komitmen batin, melainkan harus terwujud secara objektif dalam struktur sosial yang rasional.

Dalam pengertian ini, *Sittlichkeit* adalah kesatuan dialektis antara kehendak subjektif dan tatanan objektif, antara kebebasan individual dan norma universal. Kebebasan bukan lagi sekadar kemungkinan kesadaran, melainkan realitas yang dihidupi melalui institusi, kebiasaan, dan praktik sosial yang diakui bersama. Dengan menempatkan *Sittlichkeit* sebagai bentuk paling nyata dari kebebasan, Hegel secara eksplisit menolak pandangan atomistik yang memahami individu sebagai entitas yang sepenuhnya mandiri dan otonom. Individu justru menemukan dirinya secara penuh ketika ia hidup di dalam jaringan relasi sosial yang bermakna dan rasional

(Hegel, 1974, hlm 380). Sebagaimana ditegaskan Peperzak, kebebasan Hegelian bersifat substantif, bukan negatif; ia bukan kebebasan dari relasi, melainkan kebebasan di dalam dan melalui relasi etis yang dilembagakan (Peperzak, 2001, hlm. 194).

Pemahaman ini menjadi sangat relevan dalam konteks *post-truth*. Era *post-truth* kerap mereduksi kebebasan menjadi “hak menyuarakan pendapat” tanpa keterikatan pada kebenaran publik, tanggung jawab sosial, atau dampak etis. Klaim kebenaran diperlakukan sebagai preferensi privat, bukan sebagai sesuatu yang harus diuji, dipertanggungjawabkan, dan diakui secara intersubjektif. Hegel membantu kita melihat bahwa kebebasan semacam ini justru bersifat ilusif: ia menghancurkan basis kehidupan bersama dan pada akhirnya merusak kebebasan itu sendiri. Tanpa *Sittlichkeit*, kebebasan berubah menjadi anarki normatif, dan kebenaran kehilangan tempatnya sebagai horizon kolektif.

Struktur *Sittlichkeit*, menurut Hegel, terwujud dalam tiga momen etis yang saling melengkapi, yaitu keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Ketiganya bukan sekadar institusi eksternal, melainkan tahap-tahap formasi etis di mana individu belajar menghidupi kebebasan dalam konfigurasi relasi yang berbeda (Hardimon, 1994, hlm. 220-227). Setiap momen memiliki keutamaan dan keterbatasannya sendiri, dan justru dalam ketegangan dialektis antar-momen itulah kebebasan etis dimungkinkan.

Keluarga merupakan bentuk paling elementer dari kehidupan etis. Di sini kebebasan diwujudkan bukan melalui refleksi rasional atau kontrak sosial, melainkan melalui cinta, afeksi, dan pengorbanan timbal balik. Individualitas belum tampil secara penuh; yang diutamakan adalah kebersamaan dan kelekatan (Hegel, 1974). Dalam keluarga, individu belajar bahwa kebebasan bukanlah kebebasan dari yang lain, melainkan kebebasan untuk menjadi diri sendiri di dalam relasi yang mengikat dan memelihara (Cedeño, 2024). Dalam konteks *post-truth*, peran etis keluarga menjadi sangat krusial. Ketika ruang digital mendorong impulsivitas, polarisasi, dan validasi instan, keluarga dapat berfungsi sebagai ruang pertama pembentukan integritas: tempat individu belajar membedakan keinginan sesaat dari komitmen jangka panjang, belajar menahan diri, dan mengembangkan kepekaan terhadap kebenaran. Menolak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, misalnya, bukan sekadar tindakan teknis, melainkan kebiasaan etis yang pertama-tama dilatih dalam relasi intim dan penuh kepercayaan. Dengan demikian, keluarga membentuk fondasi karakter yang relatif tahan terhadap godaan manipulasi emosional khas era *post-truth*.

Namun, kehidupan etis tidak berhenti pada keluarga. Modernitas, bagi Hegel, ditandai oleh diferensiasi sosial yang semakin kompleks, yang menemukan bentuknya dalam masyarakat sipil (*bürgerliche Gesellschaft*). Berbeda dari keluarga, masyarakat sipil menonjolkan individualitas, kepentingan, dan relasi instrumental. Di sini individu berinteraksi sebagai pemilik kebutuhan, produsen, konsumen, dan warga hukum (Wood, 2012, hlm. 240). Relasi tidak lagi didorong oleh cinta, melainkan oleh kepentingan. Namun, justru dalam medan inilah Hegel melihat potensi etis yang khas: individu belajar bahwa pemenuhan kepentingan personal selalu bergantung pada jaringan sosial yang lebih luas.

Dalam masyarakat sipil, kebebasan diuji melalui hukum, pasar, dan institusi publik. Bagi Hegel, ini bukan sekadar arena kompetisi, melainkan sekolah etis di mana individu dipaksa menyadari keterikatan struktural antara dirinya dan yang lain (Hegel, 1977). Dalam konteks *post-truth*, masyarakat sipil sering kali terdistorsi menjadi arena pertarungan narasi dan manipulasi informasi demi keuntungan ekonomi atau simbolik. Di sinilah relevansi *Sittlichkeit* menjadi sangat konkret. Etika *post-truth* tidak cukup diatasi dengan seruan moral individual; ia membutuhkan pembentukan kebiasaan institusional yang mengikat kepentingan dengan tanggung jawab publik. Karakter etis dalam masyarakat sipil bukan hanya cakap memilah informasi, tetapi juga sadar bahwa penggunaan informasi selalu berdampak sosial. Kebebasan berekspresi harus disertai kesadaran akan implikasi etisnya bagi keadilan, kepercayaan, dan solidaritas.

Puncak dari *Sittlichkeit* terletak pada negara (*der Staat*), yang oleh Hegel disebut sebagai “realitas ide etis” (Giacché, 2020; Hegel, 1977). Negara bukan sekadar aparat kekuasaan atau mekanisme administratif, melainkan bentuk objektif tertinggi dari kebebasan, tempat kehendak individu dan hukum universal diperdamaikan dalam tatanan rasional. Melalui partisipasi dalam hukum, institusi politik, dan kehidupan kewargaan, individu tidak kehilangan kebebasannya, melainkan justru mengaktualkannya secara penuh (Pelczynski, 1984, hlm. 95).

Dalam era *post-truth*, krisis kepercayaan terhadap negara dan institusi publik menjadi salah satu gejala paling serius. Polarisasi politik, delegitimasi hukum, dan relativisasi kebenaran menunjukkan apa yang terjadi ketika negara gagal menjalankan fungsi etisnya. Hegel tidak mengidealkan negara empiris yang selalu rentan terhadap penyalahgunaan, melainkan menekankan negara sebagai tuntutan normatif: komunitas politik yang memungkinkan kebenaran publik ditegakkan secara institusional (Ng, 2020, hlm. 80). Dari perspektif ini, solusi terhadap *post-truth* menuntut pembentukan warga negara yang tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki loyalitas etis terhadap kebenaran bersama—warga yang berani menolak manipulasi narasi, meski hal itu menguntungkan kelompoknya sendiri.

Dengan demikian, *Sittlichkeit* menyediakan kerangka konkret untuk menghadapi krisis *post-truth*. Ia menunjukkan bahwa kebenaran tidak dapat dipertahankan hanya melalui kesadaran individual atau literasi teknis, melainkan harus dihidupi dalam jaringan kehidupan etis yang mencakup keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Di sinilah *Bildung* dan *Geist* menemukan tempatnya yang tepat, bukan sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses dan roh yang menghidupkan *Sittlichkeit*. Pendidikan karakter, dalam horizon ini, bukan sekadar transfer pengetahuan moral, tetapi pembentukan subjek yang mampu hidup dalam institusi etis, menanggung ketegangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kebenaran publik.

Dengan menempatkan *Sittlichkeit* sebagai pusat solusi, Hegel menawarkan jalan keluar yang tidak jatuh pada moralisme abstrak maupun relativisme pragmatis. Kebebasan tidak direduksi menjadi hak privat untuk mengklaim kebenaran, tetapi dipahami sebagai tugas etis untuk hidup dalam kebenaran bersama. Dalam konteks *post-truth*, inilah inti pendidikan karakter yang relevan: membentuk individu yang bukan hanya mampu berpikir kritis, tetapi juga bersedia mengikatkan dirinya pada kehidupan etis yang memungkinkan kebenaran tetap tegak di tengah tarik-menarik narasi.

Tarian Hegel di Era *Post-truth*: Dari Hukum, Hati, hingga Komunitas

Dalam lanskap *post-truth*, kebebasan yang tidak berakar pada kehidupan etis kerap berubah menjadi anarki opini. Media sosial membuka ruang ekspresi yang nyaris tanpa batas, di mana setiap individu merasa berhak menyuarakan “kebenaran”-nya sendiri, namun tanpa mekanisme pengujian kolektif yang memadai. Legalitas—seperti *community guidelines*, regulasi platform digital, atau perangkat hukum formal—sering kali hanya berfungsi sebagai pagar prosedural. Ia dapat ditegakkan secara mekanis, tetapi tidak menjamin substansi moral dari isi yang beredar. Akibatnya, berita palsu, ujaran kebencian, dan manipulasi narasi tetap dapat lolos sejauh tidak melanggar aturan formal. Legalitas semacam ini sah secara yuridis, tetapi kosong secara etis—sebuah bentuk *Recht* yang terlepas dari kehidupan moral yang hidup.

Namun, menggantungkan harapan pada moralitas subjektif pun tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Dalam ruang digital yang dikendalikan algoritma, suara hati mudah terperangkap dalam *echo chamber* yang mengukuhkan bias dan menutup diri dari koreksi. Setiap individu dapat merasa “benar” berdasarkan keyakinan batinnya sendiri, sementara klaim tersebut tidak pernah diuji dalam dialog rasional dengan yang lain. Moralitas yang seharusnya mengasah tanggung jawab justru merosot menjadi pembenaran diri. Kebebasan pun menyempit menjadi sekadar “hak untuk berbicara,” tanpa keterikatan pada kebenaran faktual maupun dampak sosial. Dalam istilah Hegelian, kebebasan berhenti pada *Moralität*—niat baik subjektif yang tidak pernah menemukan aktualitas objektifnya.

Hegel membantu kita melihat bahwa kebebasan semacam ini adalah kebebasan yang belum selesai. Kebebasan baru menemukan bentuk sejatinya ketika bergerak ke dalam horizon *Sittlichkeit*, yakni kehidupan etis yang ditopang oleh institusi sosial, hukum, dan relasi pengakuan timbal balik. Di sini, kebebasan bukan ditolak, melainkan diorkestrasi: kehendak individu menemukan ruang aktualisasi justru ketika terhubung dengan norma bersama yang rasional. Dalam kerangka ini, pengembangan karakter di era *post-truth* tidak dapat berhenti pada literasi digital atau keterampilan berpikir kritis semata. Keduanya penting, tetapi belum memadai. Yang dibutuhkan adalah pengalaman konkret dalam komunitas etis—ruang di mana klaim kebenaran diuji bersama, tanggung jawab sosial diteguhkan, dan kebebasan individu dijalani dalam jaringan pengakuan yang saling mengikat.

Fenomena politik identitas menunjukkan dengan jelas urgensi pendekatan ini. Dalam banyak perdebatan publik kontemporer, klaim kebenaran dilekatkan pada identitas kelompok, sehingga diskursus tidak lagi bertujuan mencari kebenaran bersama, melainkan mempertahankan posisi “kami” melawan “mereka.” Kebenaran direduksi menjadi instrumen mobilisasi, bukan horizon dialog. Dari perspektif Hegel, situasi ini mencerminkan kegagalan melampaui moralitas subjektif—baik individual maupun kolektif—menuju *Sittlichkeit*. Kebebasan berhenti pada partikularitas, bukannya bergerak menuju universalitas rasional di mana hukum, negara, dan ruang publik menyediakan arena pengakuan timbal balik. Di sinilah tantangan pengembangan karakter menjadi nyata: bagaimana membentuk subjek yang mampu keluar dari sekat identitas sempit dan berani mengafirmasi kepentingan universal demi solidaritas bersama.

Krisis solidaritas global—mulai dari polarisasi politik, konflik sosial, hingga ketidakmampuan merespons krisis iklim secara kolektif—menunjukkan absennya horizon etis yang mempersatukan. Masyarakat terfragmentasi ke dalam kepentingan sempit, sementara kesadaran universal runtuh di hadapan tribalitas digital. Dalam bahasa metaforis, kondisi ini menyerupai tarian kebebasan yang terhenti di tengah gerak: langkah telah diambil, tetapi tidak pernah mencapai harmoni. Tanpa orientasi pada kehidupan etis, kebebasan mudah tereduksi menjadi formalitas prosedural atau preferensi privat yang tak terkendali.

Di titik inilah peran pendidikan karakter menjadi krusial. *Bildung*, dalam arti Hegelian, tidak dapat dipahami sekadar sebagai transmisi pengetahuan atau penanaman disiplin individual. Ia adalah koreografi dari tarian kebebasan itu sendiri: proses dialektis yang membimbing individu bergerak dari hukum menuju hati, dari hati menuju komunitas. Generasi muda perlu dibimbing untuk memahami bahwa aturan memang penting, tetapi aturan hanya menjadi hidup ketika diinternalisasi secara etis; bahwa suara hati itu bernilai, tetapi harus diuji dalam dialog sosial; dan bahwa komunitas etis bukan sekadar kumpulan individu, melainkan horizon kebebasan di mana kebenaran dapat dijaga bersama.

Dengan demikian, tarian Hegel di era *post-truth* bukan sekadar metafora filosofis, melainkan peta jalan normatif-praksis bagi pengembangan karakter. Ia menegaskan bahwa karakter tidak dibangun dengan menekan kebebasan, tetapi dengan menghidupi kebebasan dalam koreografi etis yang menyatukan hukum, moralitas, dan komunitas. Pendidikan karakter yang relevan hari ini adalah pendidikan yang melatih keberanian menolak manipulasi narasi meski sesuai preferensi pribadi, kesediaan membuka diri terhadap koreksi publik, serta komitmen untuk menjaga solidaritas di tengah fragmentasi sosial.

Akhirnya, tarian Hegel menawarkan visi kebebasan yang melampaui kebisingan opini dan pertarungan narasi. Ia mengarahkan kita pada harmoni etis—sebuah kehidupan bersama yang menyatukan legalitas dengan moralitas, moralitas dengan komunitas, dan komunitas dengan kebebasan sejati. Dalam harmoni inilah kebenaran, solidaritas, dan keadilan dapat dipelihara di tengah dunia yang sarat manipulasi. Di sinilah tujuan akhir pengembangan karakter di era *post-truth* menemukan bentuknya: bukan sekadar mencetak individu yang cerdas atau kritis, melainkan membentuk manusia yang mampu *menari bersama yang lain* dalam irama kebebasan etis yang universal.

KESIMPULAN

Era *post-truth* menyingkap krisis mendasar dalam kehidupan bersama: kebenaran terfragmentasi, otoritas moral melemah, dan pembentukan karakter kehilangan pijakan etisnya. Ketika klaim kebenaran direduksi menjadi ekspresi emosional, identitas kelompok, atau preferensi privat, kebebasan terdistorsi menjadi anarki opini yang merusak ruang publik. Melalui kerangka filsafat Hegel, artikel ini menunjukkan bahwa krisis tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan epistemologis atau teknologis, melainkan sebagai kegagalan kehidupan etis yang menopang kesadaran moral. Dengan menafsirkan *Geist* dan *Bildung* sebagai dimensi internal dari *Sittlichkeit*, kajian ini menegaskan bahwa karakter sejati hanya dapat terbentuk melalui kesadaran intersubjektif, proses formasi historis-kultural, dan praksis etis yang terlembagakan dalam komunitas.

Implikasinya, pengembangan karakter di era *post-truth* tidak cukup berhenti pada literasi digital atau internalisasi nilai moral individual. Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi kehidupan etis yang memungkinkan kebebasan dan kebenaran bergerak bersama. Dalam horizon Hegelian, kebebasan baru sungguh aktual ketika dihidupi dalam *Sittlichkeit*—dalam relasi pengakuan timbal balik, institusi rasional, dan tanggung jawab publik. Dengan demikian, krisis *post-truth* dapat dibaca sebagai peluang dialektis untuk membangun kembali integritas manusia dan fondasi moral masyarakat kontemporer. Menari bersama Hegel di era *post-truth* berarti menghidupi kebebasan bukan melawan yang lain, melainkan bersama yang lain, dalam tatanan etis yang menjaga kebenaran sebagai horizon bersama.

REFERENSI

- Al Azis, M. R. (2021). Dialektika Hegel (tesis–antitesis–sintesis) dalam etika dan filsafat berkomunikasi era kontemporer. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 117–122. <https://doi.org/10.31294/jkom.v12i2.10472>
- Amanda, J. F. (2024). Teori Hegel: Dialektika dalam perubahan masyarakat. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/amanda6147/65926f8fc57afb6464295f03/teori-hegel-dialektika-dalam-perubahan-masyarakat>
- Arendt, H. (1971). Thinking and moral considerations: A lecture. *Social Research*.
- Austad, J. A. (2001). *The (dis)information age: From post-truth to post-postmodernism*. Verno Press.
- Bajwa, N., & Ng, V. (2025). Character virtues: Toward a functionalist perspective on character virtue science. *Behavioral Sciences*, 15(5), 638. <https://doi.org/10.3390/bs15050638>
- Bykova, M. F. (2020). Hegel's philosophy of *Bildung*. In *The Palgrave Hegel handbook* (pp. 425–449). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26597-7_22
- Cedeño, D. (2024). Applying Hegelian theory to contemporary family science. *Journal of Family Theory & Review*, 16(3), 563–581. <https://doi.org/10.1111/jftr.12574>
- de Vries, W. (1988). *Hegel's theory of mental activity*. Cornell University Press.

- Decety, J., & Cowell, J. M. (2015). Empathy, justice, and moral behavior. *AJOB Neuroscience*, 6(3), 3–14. <https://doi.org/10.1080/21507740.2015.1047055>
- Effron, D. A., & Helgason, B. A. (2022). The moral psychology of misinformation: Why we excuse dishonesty in a post-truth world. *Current Opinion in Psychology*, 47, 101375. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101375>
- Enroth, H. (2023). Crisis of authority: The truth of post-truth. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 36(2), 179–195. <https://doi.org/10.1007/s10767-021-09415-6>
- Forster, M. N. (1998). *Hegel's idea of a Phenomenology of spirit*. University of Chicago Press.
- Giacché, V. (2020). *Hegel: La dialettica. Introduzione al pensiero hegeliano*. Diarkos.
- Gjesdal, K. (2015). Bildung. In *The Oxford handbook of German philosophy in the nineteenth century*. Oxford University Press.
- Ham, J., Kinzel, U., & Pan, D. T. (2023). *The origins of German self-cultivation: Bildung and the future of the humanities*. Berghahn Books.
- Hardimon, M. O. (1994). *Hegel's social philosophy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511624773>
- Haslam, N., & Loughnan, S. (2014). Dehumanization and infrahumanization. *Annual Review of Psychology*, 65(1), 399–423. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115045>
- Hegel, G. W. F. (1894). *Lectures on the history of philosophy* (E. S. Haldane & F. H. Simson, Eds.). Trübner & Co.
- Hegel, G. W. F. (1971). *Werke in zwanzig Bänden* (Vol. 19). Suhrkamp.
- Hegel, G. W. F. (1974). *System der Sittlichkeit: Kritik des Fichteschen Naturrechts (1802/03)*. Felix Meiner Verlag.
- Hegel, G. W. F. (1977). *Phenomenology of spirit* (A. V. Miller, Trans.). Oxford University Press.
- Herder, J. G. von. (1787). *Gott: Einige Gespräche*. Ettinger.
- Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2018). Artificial intelligence in service. *Journal of Service Research*, 21(2), 155–172. <https://doi.org/10.1177/1094670517752459>
- Humboldt, W. von. (1903). *Theorie der Bildung des Menschen*. Reimar.
- Humboldt, W. von. (1980). *Theorie der Bildung des Menschen*. J. G. Cotta.
- Jauernig, J., Uhl, M., & Walkowitz, G. (2022). People prefer moral discretion to algorithms: Algorithm aversion beyond intransparency. *Philosophy & Technology*, 35(1), 2. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00495-y>
- Kinghorn, S. (2020). The echo chamber: Theater in a post-truth world. In *After in-her-face theatre* (pp. 231–246). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39427-1_15
- Lazarus, M. (2025). *Absolute ethical life: Aristotle, Hegel and Marx*. Stanford University Press.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the post-truth era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Long, P., Johnson, B., MacDonald, S., Bader, S. R., Wall, T., Bakir, V., & McStay, A. (2021). Postmodernism and post-truth. In *Media Studies* (pp. 414–440). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315690834-14>
- Manne, K. (2016). *Down girl: The logic of misogyny*. Oxford University Press.
- Marx, W. (1971). *Hegels Pha' nomenologie des Geistes: die Bestimmung ihrer Idee in 'Vorrede' und 'Einleitung.'* Vittorio Klostermann.
- Ng, K. (2020). *Hegel's concept of life: Self-consciousness, freedom, logic*. Oxford University Press.
- Pelczynski, Z. A. (1984). *The state and civil society: Studies in Hegel's political philosophy*. CUP Archive.
- Peperzak, A. T. (2001). *Modern freedom: Hegel's legal, moral, and political philosophy*. Springer.
- Rommetveit, K. (2022). Introduction: Post-Truth — Another fork in modernity's path. In *Post-Truth Imaginations: New Starting Points for Critique of Politics and Technoscience*. Routledge.
- Saumantri, T. (2023). Hegel's rationalism: The dialectical method of approaching metaphysical problems. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3).
- Simon, J. C. (2020). Pendidikan Kristiani di era post-truth: Sebuah perenungan hermeneutis Paul Ricoeur. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 5(1), 93–110. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.330>
- Solovev, K., & Pröllochs, N. (2022). Moral Emotions Shape the Virality of COVID-19 Misinformation on Social Media. *Proceedings of the ACM Web Conference 2022*, 3706–3717. <https://doi.org/10.1145/3485447.3512266>
- Stekeler-Weithofer, P. (2020). Absolute Spirit in Performative Self-Relations of Persons. In *The Palgrave Hegel Handbook* (pp. 109–131). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26597-7_6
- Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press.
- Tegmark, M. (2017). *Life 3.0: Being human in the age of artificial intelligence*. Alfred A. Knopf.

- Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. Basic Books.
- Vacura, M. (2020). Emergence of the Post-truth Situation—Its Sources and Contexts. *Disputatio*, 9(13), 1–17.
- Vogelmann, F. (2018). The Problem of Post-Truth Frieder Vogelmann Abstract. *Behemoth A Journal on Civilisation*, 11(2).
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. In *Council of Europe*.
- Wood, A. W. (2012). *Hegel's ethical thought*. Cambridge University Press.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.